FEMINSME, KEAMANAN DAN ISU PERDAGANGAN MANUSIA

¹Yusnarida Eka Nizmi, ²Adianto

^{1,2}Hubungan Internasional, Universitas Riau, Administrasi Publik Universitas
Riau
eka.nizmi@lecturer.unri.ac.id,

Diterima: 13 September 2020 Disetujui: 29 Desember 2020 Dipublikasi: 30
Desember 2020

Abstract

Human Trafficking grows rapidly as a threat for security. Some questions need to answer such as human trafficking by organized crimes are insecure for what dan who? Traditional security approach to human trafficking needs analyzes that human trafficking is a threat for state and borders. Feminism approach has priority in security issue from trafficked people and traffickers that victims got intimidation both from organized crimes and states. This research assumes that feminism approach to human trafficking is important to understand and against this horrible crime. It is not simply says that security approach to human trafficking will be classified into feminism approach, but this research try to describe feminism approach to human trafficking in constructing idea about the necessity gender as an analysis category. As noted that feminisme not only making women exist in security perspectif and gender focus that correlated with abuse of human rights but also significantly study behaviour gender stereotype that used to be existed in gender practices dan created women as victim.

Keywords: Security, Feminism Approach, Human Trafficking, Organized Crimes.

Perdagangan manusia semakin berkembang dilihat sebagai sebuah ancaman keamanan. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah perdagangan manusia yang dilakukan oleh kelompok kejahatan terorganisir mengancam keamanan apa dan siapa. Pendekatan keamanan tradisional terhadap perdagangan manusia membutuhkan analisis bahwa perdagangan manusia merupakan sebuah ancaman terhadap negara dan kontrol negara atas perbatasan. Analisa feminis mengenai perdagangan manusia memprioritaskan keamanan dari orang-orang yang diperdagangkan dan dikenal sebagai pelaku dimana korban diancam baik oleh pelaku kejahatan terorganisir maupun oleh negara. Penelitian ini berpendapat bahwa pendekatan feminis terhadap perdagangan manusia penting untuk memahami dan melawan kejahatan ini. Tidak untuk mengatakan, bahwa pendekatan keamanan manusia terhadap perdagangan manusia akan digolongkan pada pendekatan feminis; namun tulisan ini mencoba untuk memaparkan analisa feminis mengenai perdagangan manusia membangun perlunya jender sebagai sebuah kategori analisis Sebagaimana dicatat, feminis tidak hanya menjadikan perempuan masuk dalam kerangka keamanan dan fokus jender berhubungan dengan pelanggaran hak asasi manusia namun juga secara signifikan mempelajari perilaku dimana stereotype jender

dulunya hadir dalam praktek-praktek jender dan menjadikan perempuan sebagai korban.

Kata Kunci: Keamanan, Perspektif Feminis, Perdagangan Manusia, Kejahatan Terorganisir.

Pendahuluan

Teori-teori feminis masuk dalam disiplin hubungan internasional pada akhir 1980an dan awal 1990an. Awal kemunculan dari feminisme hubungan internasional berhubungan dengan adanya gejolak dalam disiplin ilmu ini-sering diasumsikan sebagai “debat ketiga” (atau kadang-kadang sebagai “debat keempat”). Para pemikir feminis awalnya menantang disiplin ilmu HI untuk berpikir mengenai bagaimana teori harus direformulasi dan bagaimana pemahamannya mengenai politik global harus dikembangkan jika membahas mengenai pengalaman perempuan. Kaum feminis mengklaim bahwa hanya dengan menggunakan analisa jender perbedaan dampak dari sistem negara ekonomi global terhadap kehidupan kaum perempuan dan laki-laki dapat sepenuhnya dipahami. Kaum feminis hubungan internasional mengkritik beberapa konsep inti dari hubungan internasional seperti kedaulatan, negara dan keamanan.

Dalam penelitian ini, penulis menunjukkan bahwa feminis melakukan dua kontribusi esensial untuk analisis perdagangan manusia internasional, yakni memperluas fokus analisa perdagangan manusia yang ditujukan pada eksploitasi orang-orang yang diperdagangkan dan memberi perhatian bagaimana konsep perdagangan manusia secara sosial dibangun. Penulis berpendapat bahwa kontribusi-kontribusi feminis ini dapat dijadikan dasar bagi reformulasi pendekatan terhadap perdagangan manusia bagi studi-studi keamanan.

Tulisan ini mendiskusikan bagaimana pendekatan Feminis memandang isu keamanan dan kejahatan terhadap kemanusiaan yaitu perdagangan manusia yang umumnya dilakukan oleh kelompok kejahatan terorganisir . Feminis melihat perdagangan manusia dan status dari prostitusi secara lebih mendalam. Dua sisi dari perdebatan feminis memberi petunjuk penting bagi masa depan studi perdagangan manusia, menarik perhatian yang lebih besar pada orang-orang yang diperdagangkan sementara jender digunakan sebagai sebuah analisis kategori untuk merefleksikan gambaran sebenarnya dari orang-orang tersebut.

Metode Penelitian

Penelitian ini melakukan pengumpulan data dengan menggunakan Teknik kepustakaan (*library research*). Teknik kepustakaan digunakan karena banyak informasi dan data tentang kejahatan terorganisir, pemikiran feminis, dapat ditelusuri dalam buku-buku, jurnal-jurnal ilmiah, surat-surat kabar, majalah-majalah, dan sumber-sumber dari *website* yang dapat diakses melalui internet. Teknik ini ditujukan untuk memperoleh data dan informasi mengenai fenomena perdagangan orang yang dilakukan oleh kelompok kejahatan terorganisir.

Creswell memberikan pedoman dalam melakukan *review literature* sebagai berikut:¹

1. *Begin with journal*
2. *Next review related topic*
3. *Follow their research by reading recent conference paper on a topic*
4. *If time permits, look at the abstract of the dissertation in dissertation abstracts later national.*

Penulis melakukan review yang komprehensif terhadap artikel-artikel dan buku-buku yang sudah diterbitkan mengenai perdagangan orang, feminisme, dan kejahatan terorganisir. Untuk memulai literatur review ini, tulisan ini menetapkan beberapa parameter apa yang dimaksud dengan “kelompok kejahatan terorganisir merujuk pada pemikiran Hagan . Penelitian literatur ini juga memfokuskan pada publikasi-publikasi yang berbahasa Inggris,

Kerangka Pemikiran

Premis dasar bahwa para penstudi perdagangan manusia perlu untuk mengganti fokus mereka dari keamanan negara menjadi keamanan orang, pendekatan feminis pada perdagangan orang dimulai dengan menganalisis pengalaman-pengalaman orang yang diperdagangkan, ditekankan pada perempuan korban perdagangan untuk eksploitasi seksual. Dari sebuah titik terang ini, kelompok feminis berpendapat bahwa pendekatan-pendekatan keamanan tradisional sangat terbatas apalagi dalam menyelesaikan persoalan perdagangan manusia.

Pertama, kebijakan-kebijakan dalam mengontrol perbatasan yang repressif, membuat migrasi menjadi lebih sulit dan berbahaya serta meningkatkan status rawan para migran bagi para pelaku perdagangan orang yang dilakukan oleh kelompok kejahatan terorganisir. Kedua, orang-orang yang diperdagangkan yang mendeportasi diri mereka sendiri dalam re-trafficking. Singkatnya, kelompok feminis tetap berasumsi bahwa pendekatan-pendekatan keamanan tradisional terhadap perdagangan orang baik secara moral maupun praktek masih sangat kurang.

Analisa feminis mengenai perdagangan manusia lebih mendalam dibanding merujuk pada keamanan dari negara terhadap masyarakat. Kelompok feminis menekankan perlunya memberi perhatian terhadap para korban agar mendapatkan pemahaman bagaimana para aktor tersebut menjadi ancaman. Pendekatan feminis terhadap perdagangan orang secara jelas berbagi pemahaman dengan kerangka studi alternatif yang muncul dalam dua dekade terakhir. Dalam tulisan J. Ann Tickner, “Feminists” berkomitmen terhadap tujuan emansipatori untuk mengakhiri subordinasi perempuan konsisten dengan defenisi keamanan yang mengacu pada individu, posisi dalam struktur sosial yang lebih luas, sebagai awal poinnya”²

¹ Jhon W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, (London: Sage Publication, 1994), p. 27-28.

² Tickner, J. Ann, *Gendering World Politics* (New York: Columbia University Press 2001).

Hasil dan Pembahasan

Perdagangan Manusia Dalam Konteks Terminologi

Pergerakan perempuan dan anak dari satu kota ke kota lain dan dari satu negara ke negara lain untuk tujuan mempekerjakan mereka dalam aktivitas-aktivitas kriminal, menahan mereka di rumah-rumah bordil legal maupun illegal, atau memanfaatkan mereka sebagai budak adalah sebuah kejahatan kemanusiaan dan pelanggaran terhadap hak sipil. Tidak dapat dibantah, perdagangan manusia perempuan dan anak untuk tujuan perbudakan, tenaga kerja anak, pronografi, dan prostitusi menjadi persoalan sosial yang harus diwaspadai. Sebuah persoalan sosial adalah sebuah kondisi yang memiliki dampak signifikan terhadap sejumlah orang dan sesuatu yang dapat di cegah³. penderitaan, dan rasa sakit yang luar biasa sengaja diciptakan untuk perempuan dan anak yang secara illegal dipindahkan dan dipekerjakan bertentangan dengan keinginan mereka yang sebenarnya.

Sementara Keluarga mereka, orang-orang yang mereka cintai, berasumsi bahwa para korban pergi untuk bekerja mencari nafkah dan akan segera kembali. Kemudian pada akhirnya, mereka mengetahui bahwa orang yang mereka sayangi hidup dalam siksaan dan bahkan berakhir pada kematian. Beberapa pihak keluarga harus hidup tanpa menerima kabar apapun dari orang-orang yang mereka sayang. Banyak sekali laporan bahwa perempuan dan anak-anak yang secara illegal dipindahkan dari daerah mereka untuk dijadikan budak, pronografi, tenaga kerja anak, atau bahkan prostitusi. Beberapa dari para korban ini diperdagangkan dan bahkan menjadi korban pembunuhan beerencana untuk organ tubuh mereka⁴.

Protokol PBB pasal 3 (a) mendefenisikan perdagangan orang

“the recruitment, transportation, transfer, harbouring or receipt of persons, by means of the threat of use of force or other forms of coercion, of abduction, of fraud, of deception, of the abuse of power or of a position of vulnerability or of the giving or receiving of payments or benefits to achieve the consent of a person having control over another person, for the purpose of exploitation.” Exploitation is defined as *“the exploitation of the prostitution of others or other*

³ Clinard, M. *The Sociology of Deviant Behavior*, Holt, Rinehart, and Winston, New York, 1958. Lihat juga Campbell, C *Social Problems*, Free Press, New York, 1981.

⁴ Ebbe, O.N.I. Political-criminal nexus “Slicing Nigeria’s national cake: The Nigerian case,” *Trends in Organized Crime*, 1999, 4(3): 29–59. Lihat juga Ebbe, Slicing Nigeria’s “national cake.” In: Roy Godson, ed. *Menace to Society: Political–Criminal Collaborations around the World*. New Brunswick: Transaction Publishers, 2003, 137-174.

forms of sexual exploitation, forced labor or services, slavery or practices similar to slavery, servitude or the removal of organs.”⁵

Protokol ini tidak mendefinisikan “eksploitasi prostitusi dan bentuk-bentuk lain dari eksploitasi seksual”, karena tidak ada konsensus antar delegasi pemerintah untuk merundingkan makna yang disepakati mengenai frase tersebut. Para delegasi pemerintah yang hadir di Konvensi Palermo sepakat bahwa kehadiran yang terpaksa dalam sebuah prostitusi dapat dianggap sebagai trafficking yang terencana, namun hampir semua delegasi menolak ide bahwa partisipasi tanpa paksaan yang dilakukan oleh orang dewasa dimasukkan dalam kategori trafficking yang terstruktur. Oleh karena itu, negara dipersilahkan mendefinisikan prostitusi yang dilakukan oleh orang dewasa tanpa paksaan berdasarkan hukum dan kebiasaan di negara masing-masing. Protokol perdagangan orang hanya fokus pada prostitusi yang dilakukan dengan paksaan dan melibatkan tindak kejahatan seperti kekerasan, dan lain-lain, dan negara tidak seharusnya beranggapan bahwa keterlibatan orang dewasa dalam prostitusi menjadi bagian dari trafficking.

Ada studi yang sistemik mengenai eksploitasi kriminal terhadap perempuan dan anak melalui trafficking yang dilakukan oleh kejahatan terorganisir yang dapat ditemui dalam berbagai penelitian dan laporan. Kita sering mendengar mengenai berita hilangnya anak atau hilangnya orang dewasa. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah, dimanakah mereka? Apa yang terjadi dengan mereka? Jawabannya adalah, mereka seringkali menjadi korban pembunuhan untuk mengambil organ tubuh mereka, dijual untuk tujuan perbudakan, dipaksa bekerja dalam aktivitas pornografi, prostitusi, atau bahkan dijadikan budak seks bagi kaum kaya. Tidak diragukan lagi, perpindahan perempuan dan anak secara illegal seringkali berakhir pada mereka yang “dinyatakan hilang”, sulit sekali untuk memperkirakan jumlah perempuan dan anak yang diperdagangkan setiap tahunnya oleh jaringan pelaku kejahatan terorganisir ini.

Krisis nasional maupun internasional dapat berimbas pada kemudahan dalam penyebaran perpindahan perempuan dan anak secara illegal sejak tahun 1960-an. Dari Krisis Kongo pada tahun 1960-an sampai Perang Nigeria-Biafra (1967-1970), Perang Eritrea-Ethiopia 1970an, perang Kemerdekaan Mozambik dan krisis Rezim Marxist di tahun 1970an dan 1980an, perang Angola di tahun 1970an, 1980an, dan 1990an, Afrika Selatan dan Krisis Regim Apartheid dari tahun 1960an sampai tahun 1994, Perang Sipil Liberia 1980an dan 1990an, Perang Sipil Sierra Leone tahun 1990an, Genosida Randa 1970an dan 1980an, Perembersihan Etnis di Uganda pada tahun 1970an dan 1980an, Serta krisis Nicaragua 1980an dan 1990an, Krisis Argentina 1970an dan 1980an, Perang Afghanistan-Uni Soviet 1970an dan 1980an, Al Qaida di Afghanistan, perang Iraq-Amerika Serikat yang bermula di tahun 2001, Palestina-Israel dari tahun

⁵ General Assembly Resolution 55/25 of 15 November 2000 dalam United Nations Office on Drugs and Crime, United Nations Convention against Transnational Organized Crime and The Protocols Thereto, 2004.

1948 sampai dengan sekarang, lebih dari 3 juta perempuan dan anak berpindah secara ilegal. Namun, dampak global dari perpindahan ilegal para pengungsi ini belum dikaji secara mendalam. Perang sipil dan Krisis Politik memberi ruang imperialisme di negara-negara berkembang. Perang menempatkan perempuan dan anak menjadi target bagi individu-individu tamak untuk menjadikan mereka sumber pendapatan dengan cara yang cepat. Saat ini, Hampir semua perang dan krisis terjadi di negara-negara berkembang seperti Afrika, Asia, Amerika Latin, dan Timur Tengah. Konsekwensi yang muncul adalah, perdagangan perempuan dan anak terjadi dari negara-negara berkembang dengan tujuan negara sekutu yang sudah maju industrialisasinya. Hampir semua perempuan dan anak yang dipindahkan secara ilegal berasal dari Afrika, Amerika Selatan, Tmur Tengah, dan Asia berakhir di Eropa Barat, Kanada, dan Amerika Serikat. Sejak runtuhnya Uni Soviet, potret wilayah-wilayah Asal Perdagangan kian bertambah luas dari sebelumnya. Meskipun para perempuan yang menjadi korban perdagangan orang memiliki karakteristik yang berbeda, namun faktor-faktor penggerakannya pada dasarnya sama saja di semua wilayah.

Ada beragam kajian mengenai karakteristik perempuan yang menjadi korban perdagangan orang yang dilakukan oleh kelompok kejahatan terorganisir. Beberapa studi menggambarkan mereka sebagai korban ⁶. Namun, tidak semua perempuan yang diperdagangkan adalah korban ⁷. Meskipun studi mengenai

⁶ Bertone, A.M Sexual trafficking in women: International political economy and the politics of sex, *Geneva Issues*, 2000, 18(1): 4–18. Lihat juga, Doezema, J. Loose women or lost women? The re-emergence of white slavery in contemporary discourse of trafficking in women. *Gender Issues*, 2000, 18 (1): 23-55. Gushulak, B.D. dan W.W. MacPherson, Health issues associated with the smuggling and trafficking of migrants, *Journal of Immigrant Health*, 2000, 2(2): 67–78. Bales K. dan P.T. Robbins, No one shall be held in slavery or servitude: A critical analysis of international slavery agreements and concepts of slavery, *Journal of International Affairs*, 2001. 2 (2): 18-37. Adepoju, A. Review of research and data on human trafficking in sub-Saharan Africa. In : *Data and Research on Human Trafficking: A Global Survey*, ed. Frank Laczko and Elzvieta Gozdzia. IOM, Geneva, 2005, pp. 75-80. Hyland, K.F . International Organization for Migration, *Paths of Exploitation: Studies on the Trafficking of Women and Children Between Cambodia, Thailand, and Vietnam*, IOM, Geneva. International Organization for Migration, New IOM figures on the global scale of trafficking, *Trafficking in Migrant Quarterly Bulletin* (April), 2001. Laczko F. dan E. Gozdzia, eds., *Data and Research on Human Trafficking: A Global Survey*, IOM, Geneva, 2005.

⁷ Tyldum G. dan A. Brunovskis, Describing the unobserved: Methodological challenges in empirical studies on human trafficking. In *Data and Research on Human Trafficking: A Global Survey*, ed. Frank Laczko and Elzbieta Gozdzia, IOM, Geneva, 2005.

perdagangan perempuan dan anak masih terpecah-pecah, perlu bagi para peneliti untuk terus menggambarkan beragam sudut pandang dari para korban yang diperdagangkan, agensi-agensi penegak hukum, NGO, para penggerak HAM, mewawancarai mereka untuk mendapatkan informasi secara lengkap mengenai perdagangan orang.

Memahami Terminologi Kejahatan Terorganisir

Tidak seperti kelompok teroris yang menjadikan politik, agama atau ideologi sebagai tujuan kegiatan, kelompok kejahatan transnasional menjadikan ekonomi sebagai tujuan utamanya (Makarenko, 2004; Madesn, 2009)⁸. Ancaman yang disebabkan oleh kejahatan ini tidak dapat diabaikan, karena riset yang banyak dilakukan menunjukkan bahwa kejahatan transnasional yang terorganisir ini mengancam kestabilan baik ekonomi global maupun keamanan global⁹.

Phil Williams mengungkapkan bahwa aktivitas dan jaringan kelompok kejahatan transnasional merupakan ancaman non militer yang paling serius yang dapat mengancam bidang ekonomi yang lebih besar-termasuk ekonomi Amerika, Cina dan Uni Eropa- dan bahkan negara- negara berkembang yang menjadi pasar bagi barang-barang illegal.¹⁰

Melihat pada volume liputan media, Moran menemukan bahwa kejahatan terorganisir transnasional secara signifikan meningkat pada sepuluh tahun terakhir antara tahun 1991 dan 2001¹¹. Globalisasi dianggap sebagai kotributor utama. Kelompok-kelompok kriminal dari struktur organisasi yang

⁸ Madesn, Frank *Transnational Organized Crime* (Abingdon: Routledge, 2009). Lihat juga Makarenko, Tamara “ The Crime-Terror Continuum: Tracing the Interplay between Transnational Organised Crime and Terrorism”, *Global Crime* (Vol. 6, No. 1, Spring 2004), pp. 129-45.

⁹ Lupsha, Peter. “ Transnational Organized Crime versus the Nation State”, *Transnational Organized Crime* (Vol.2, No. 1, Spring 1996), pp. 21-48. Lihat juga Eavis, Paul. ‘The Hidden Security Threat: Transnational Organised Criminal Activity’, *RUSI Journal* (Vol. 146, No. 6, December 2001). Pp. 45-50

¹⁰ Bergeron, James. ‘ Transnational Organised Crime and International Security: A Primer’, *RUSI Journal* (Vol, 158, No, 2, April/May 2013), pp. 6-9. Lihat juga Williams, Paul. ‘Transnational Criminal Organisations and International Security’, *Survival* (Vol. 36, No. 1, Spring 1994).

¹¹ Moran, N. R., *The Globalization of Russian, Colombian, and Chinese Organized Crime 2001: A Time Series analysis*. Dissertation Abstracts, 63 (7), 2703 A, 2003.

berbeda terikat dalam semua tipe kejahatan termasuk perdagangan manusia dan beragam komoditasnya, kejahatan di bidang keuangan, penyiksaan, perjudian, prostitusi, dan kejahatan-kejahatan yang mengandung unsur kekerasan.

Analisis dari seorang kriminolog Analisis dari seorang kriminolog Frank Hagan bisa dipakai untuk konsensus mengenai makna dari kejahatan terorganisir. Hagan berusaha untuk menjelaskan elemen-elemen yang umum terdapat pada kejahatan terorganisir. Setelah membaca banyak buku dalam mendefinisikan kejahatan terorganisir secara eksplisit, Hagan mengungkapkan bahwa defenisi tersebut berasal dari 13 pengarang buku dan laporan-laporan pemerintah mengenai kejahatan terorganisir selama kurun waktu 15 tahun. Penelitian meng-update analisa Hagan dengan para pengarang yang mencoba mendefinisikan kejahatan terorganisir.¹²

Berita baiknya bahwa ada konsensus yang muncul mengenai apa yang mendasari terbentuknya kejahatan terorganisir. Hagan memaparkan ada 11 atribut yang melekat pada kejahatan terorganisir antara lain, struktur hirarki, berbasis pada marjin keuntungan, menggunakan paksaan maupun ancaman, korupsi dengan imunitas, monopoli pasar, adanya permintaan pasar, keanggotaan yang terbatas, tidak berbasis pada ideologi, pasar khusus, jejaring yang rahasia, dan perencanaan yang sangat terstruktur. Dari sebelas atribut tersebut, ada konsensus bahwa fungsi kejahatan terorganisir adalah sebagai perpanjangan bisnis yang aktivitasnya menghasilkan keuntungan dengan cara melakukan aktivitas terlarang, keberlangsungannya dilakukan dengan menggunakan ancaman dan tekanan melalui korupsi di tubuh pemerintahan demi menjamin imunitas dari penegakan hukum. Ada juga konsensus yang mengatakan bahwa kejahatan terorganisir cenderung melakukan penjualan-pembelian-pelayanan barang dan jasa yang illegal karena tingginya permintaan publik melalui kontrol monopoli dan pasar terlarang.

Atribut kejahatan terorganisir Hagan mengilustrasikan konsensus bahwa kejahatan terorganisir memiliki keanggotaan yang eksklusif, memiliki alasan ideologi atau politik dibalik aktivitasnya, mensyaratkan spesialisasi dalam perencanaan atau pelaksanaan aktivitas tertentu, atau melakukan aktivitas secara rahasia. Oleh karena itu, didapat defenisi kejahatan terorganisir, berdasarkan konsensus para penulis selama 35 tahun terakhir yaitu: kejahatan terorganisir adalah perpanjangan bisnis kriminal yang bekerja untuk mendapatkan keuntungan melalui aktivitas terlarang karena tingginya permintaan publik. Keberlanjutan aktivitas dipertahankan dengan menggunakan kekuatan, ancaman, kontrol monopoli, dan/atau korupsi instansi pemerintah.

Feminisme dan Isu Keamanan

¹² Hagan, Frank E. 'The Organized Crime Continuum: A Further Specification of a New Conceptual Model,' *Criminal Justice Review*, (Spring, 1983), vo. 8, pp. 52-57.

Para sarjana konvensional Hubungan internasional, terutama realis, mendefinisikan keamanan terutama dalam terminologi keamanan negara. Keamanan negara adalah sesuatu yang dapat melindungi fisiknya dan batasan-batasan moral melawan “anarki sistem internasional. Neorealis fokus pada struktur anarki dari sistem internasional dimana tidak ada kedaulatan untuk mengatur perilaku negara. Mereka memaparkan negara sebagai aktor tunggal yang memiliki struktur dan kebijakan internal yang tidak begitu penting dibandingkan kondisi anarki ini dalam menjelaskan keamanan dan ketidakamanan mereka. Peningkatan power dengan kemampuan militer negara adalah cara untuk meningkatkan keamanan mereka; banyak pakar keamanan percaya bahwa power merupakan cara untuk mempromosikan keamanan sehingga mampu menjelaskan perilaku dari negara-negara dalam konteks internasional.

Pada tahun 1980an, para ilmuwan HI mulai menantang penjelasan ini dan mencoba untuk mengartikulasikan definisi yang lebih luas mengenai keamanan. Sejak perang tahun 1945 kajian HI sudah dipenuhi oleh pertentangan etnik dan nasionalis dan pertarungan tidak melewati batas-batas internasional, mereka mencoba untuk menganalisa hubungan antara ancaman militer dengan ekonomi dan lingkungan.

Hampir semua negara-negara miskin dunia memiliki konflik militer dengan perbatasan mereka. Konflik ini berkontribusi terhadap tingginya jumlah sipil yang terlibat menjadi kekerasan struktural- kekerasan dilakukan kepada orang-orang ketika kebutuhan dasar mereka tidak terpenuhi- dan ketika terjadi kerusakan lingkungan. Para sarjana keamanan kritis, sebagaimana yang mereka sebutkan, dimulai dengan mendefinisikan terminologi mengenai ancaman terhadap kehidupan manusia dan survival- keamanan individu dan lingkungan mereka, demikian juga dengan keamanan negara.

Seperti halnya dengan para pemikir *critical security*, banyak kelompok pemikir realis mendefinisikan keamanan secara luas dalam multidimensi dan multilevel- seperti halnya pengurangan segala bentuk kekerasan, termasuk fisik, struktural, dan ekologi. Menurut kelompok feminis, ancaman keamanan termasuk kekerasan domestik, pemerkosaan, kemiskinan, subordinasi jender, dan kerusakan lingkungan sebagaimana halnya ancaman perang. Feminis tidak hanya memperluas makna keamanan namun juga mempertanyakan siapa yang menjamin keamanan. Hampir semua analisis mereka mengenai keamanan dimulai dari bawah, yakni individu atau komunitas, dibandingkan dimulai dengan negara atau sistem internasional.

Isu Perdagangan Orang dan Feminisme

Makna keamanan mendapat porsi yang lebih besar setelah akhir Perang Dingin, dimana para penstudi keamanan mencoba untuk memperluas konsep keamanan diluar dari militer untuk memasukkan isu-isu seperti ekonomi,

lingkungan, dan kesehatan dan untuk memperdalam pendekatan terhadap keamanan dengan menambahkan level-level analisis.¹³

Pemikir feminis menantang pendekatan keamanan tradisional terhadap perdagangan manusia internasional pada dua level: etikal dan pragmatik. Kelompok feminis mengungkapkan bahwa sebagai sebuah isu dari etika, perdagangan manusia pertama dan utama adalah pelanggaran terhadap hak asasi manusia¹⁴. Fokus pada persoalan perdagangan sebagai sebuah ancaman keamanan mulai didengungkan pada akhir Perang Dingin.

Kelompok feminis mengidentifikasi etika dan pragmatik untuk memperluas fokus analisa dari negara sampai masyarakat. Kelompok feminis paling berkontribusi terhadap penjelasan terhadap perdagangan orang, yang memaparkan peran destruktif bahwa stereotype rasis dan jenis kelamin memainkan peran penting dalam mengkonstruksi kategori dari para korban perdagangan manusia.

Pendekatan feminis terhadap perdagangan manusia sangat essensial bagi para penstudi keamanan yang ingin menempatkan aktivitas sebagai sebuah ancaman terhadap negara dan orang. Feminis menggambarkan bahwa pendekatan keamanan tradisional terhadap perdagangan manusia adalah tidak tepat, tidak hanya pada tataran moral, namun juga pada tataran pragmatik. Isu feminis yang paling signifikan memunculkan pertanyaan siapa dan apa yang harus diamankan. Jika objek keamanan adalah negara, maka *counter trafficking* akan difokuskan pada kebijakan mengontrol perbatasan dan oleh karena itu orang-orang yang diperdagangkan lebih dianggap sebagai kriminal dibanding korban.

Keadaan ini tidak hanya mengancam hak asasi manusia dari korban perdagangan manusia, namun juga menggiring korban pada peluang *re-trafficking* jika mendapatkan deportasi. Jika rujukan keamanan diperluas termasuk keamanan individu yang diperdagangkan, maka *countertrafficking* akan layanan sosial dan perlindungan hak asasi manusia akan dapat diusahakan, sehingga membuat korban berkurang tingkat kerawanannya di masa depan.

Pendekatan Feminis secara khusus menempatkan prostitusi, perdagangan manusia dan pedagangan seks harus dihentikan dan berasumsi bahwa eliminasi prostitusi akan mengakhiri kebutuhan akan perdagangan seks dan promosi akan kesetaraan jender dapat lebih berjalan secara umum. Pendekatan Feminis fokus

¹³ Krause Keith dan Williams, C. Michael "Broadening the Agenda of Security Studies: Politics and Methods," *Mershon International Studies Review* 40, no. 2 (1996) ; Lihat juga Mathews, Tuchman Jessica, "Redefining Security," *Foreign Affairs* 68, no. 2 (1989) .Ullman, H. Richard, "Redefining Security," *International Security* 8, no. 1 (1983). Wolfers, Arnold, "'National Security'" As an Ambiguous Symbol," *Political Science Quarterly* 67, no. 4 (1952);

¹⁴ Barry, Kathleen, *Female Sexual Slavery* (New York: New York University Press, 1979).

pada sejumlah elemen yang penting dalam perdagangan manusia. Para korban perdagangan manusia seringkali mendapatkan penipuan di awal dan terperdaya oleh strategi-strategi rekrutmen, hak asasi manusia dilanggar oleh mereka yang memperdagangkan korban dan para korban juga tidak mendapat haknya oleh negara dimana ia ditempatkan. Krusial bagi para penstudi, aktivis, dan pembuat kebijakan tidak hanya melindungi dan menguatkan orang-orang korban perdagangan orang namun juga mempertimbangkan implikasi-implikasi dari bagaimana mereka (korban perdagangan) dipaksa untuk menjadi subjek yang menghasilkan.

Perhatian yang lebih besar terhadap konstruksi sosial dari perdagangan manusia, ditambah perhatian terhadap korban, sangat diperlukan karena dampak stereotipe gender membahayakan mereka yang menjadi korban dan termarginalisasi. Harus dianalisa mengenai dampak terhadap kehidupan mereka dengan beragam cara selain hanya dipandang sebagai pelaku dan kemudian mengeksploitasi mereka. Tickner mengingatkan bahwa "perhatian keamanan yang hanya didasarkan pada perlindungan dan penguatan hirarki gender, hanya akan menghancurkan keamanan yang sesungguhnya dari kehidupan perempuan¹⁵." Isu analisis terkait dengan perdagangan orang, secara eksplisit feminis akan mengeksplorasi bagaimana negara menghapus lingkaran ini.

Sebagai perintis dari pendekatan HAM terhadap perdagangan manusia, kelompok feminis memprotes masih sangat umumnya perlakuan yang diberikan terhadap individu-individu yang diperdagangkan –khususnya perempuan- justru dianggap sebagai kriminal dibandingkan korban¹⁶. Para pelaku perdagangan manusia (penjual) mendapat sedikit sekali hukuman, sementara individu korban perdagangan justru menjadi korban sebanyak dua kali: pertama oleh para pelaku perdagangan orang dan kedua oleh pemerintah yang mereka datangi.

Kesimpulan

Proses perdagangan manusia dapat dipahami dengan menggunakan perspektif feminis. Perspektif ini mendukung argumen penulis bahwa proses perdagangan manusia terjadi karena didukung oleh beberapa faktor. Faktor-faktor ini menghadirkan dinamika-dinamika tersendiri dalam aspek pelaksanaannya di lapangan yang memberi celah besar terhadap perempuan untuk menjadi pihak yang sangat potensial menjadi korban perdagangan manusia yang dilakukan oleh jaringan kelompok kejahatan terorganisir..

Daftar Pustaka

¹⁵ Tickner, *Opcit* 2001

¹⁶ Raymond, G. Janice, dan Donna M. Hughes, *Sex Trafficking of Women in the United States: International and Domestic Trends* (New York: Coalition Against Trafficking in Women, 2001).

Adepoju, A. Review of research and data on human trafficking in sub-Saharan Africa. In : *Data and Research on Human Trafficking: A Global Survey*, ed. Frank Laczko and Elzvieta Gozdzia. IOM, Geneva, 2005, pp. 75-80

Bales K. dan P.T. Robbins, No one shall be held in slavery or servitude: A critical analysis of international slavery agreements and concepts of slavery, *Journal of International Affairs*, 2001. 2 (2): 18-37.

Barry, Kathleen, *Female Sexual Slavery* (New York: New York University Press, 1979).

Bergeron, James. ‘ Transnational Organised Crime and International Security: A Primer’, *RUSI Journal* (Vol, 158, No, 2, April/May 2013), pp. 6-9.

Bertone, A.M Sexual trafficking in women: International political economy and the politics of sex, *Geneva Issues*, 2000, 18(1): 4–18.

Campbell, C *Social Problems*, Free Press, New York, 1981.

Clinard, M. *The Sociology of Deviant Behavior*, Holt, Rinehart, and Winston, New York, 1958.

Creswell, Jhon W. *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches*, (London: Sage Publication, 1994), p. 27-28.

Doezema, J. Loose women or lost women? The re-emergence of white slavery in contemporary discourse of trafficking in women. *Gender Issues*, 2000, 18 (1): 23-55.

Eavis, Paul. ‘The Hidden Security Threat: Transnational Organised Criminal Activity’, *RUSI Journal* (Vol. 146, No. 6, December 2001). Pp. 45-50

Ebbe, O.N.I. Political-criminal nexus “Slicing Nigeria’s national cake: The Nigerian case,” *Trends in Organized Crime*, 1999, 4(3): 29–59.

....., Slicing Nigeria’s “national cake.” In: Roy Godson, ed. *Menace to Society: Political–Criminal Collaborations around the World*. New Brunswick: Transaction Publishers, 2003, 137-174.

General Assembly Resolution 55/25 of 15 November 2000 dalam United Nations Office on Drugs and Crime, United Nations Convention against Transnational Organized Crime and The Protocols Thereto, 2004.

Gushulak, B.D. dan W.W. MacPherson, Health issues associated with the smuggling and trafficking of migrants, *Journal of Immigrant Health*, 2000, 2(2): 67–78.

Hagan, Frank E. ‘The Organized Crime Continuum: A Further Specification of a New Conceptual Model,’ *Criminal Justice Review*, (Spring, 1983), vo. 8, pp. 52-57.

Hyland, K.F . International Organization for Migration, *Paths of Exploitation: Studies on the Trafficking of Women and Children Between Cambodia, Thailand, and Vietnam*, IOM, Geneva. International Organization for Migration, New IOM figures on the global scale of trafficking, *Trafficking in Migrant Quarterly Bulletin* (April), 2001.

Krause Keith dan Williams, C. Michael “Broadening the Agenda of Security Studies: Politics and Methods,” *Mershon International Studies Review* 40, no. 2 (1996) ;

Laczko F. dan E. Gozdzia, eds., *Data and Research on Human Trafficking: A Global Survey*, IOM, Geneva, 2005.

Lupsha, Peter. “ Transnational Organized Crime versus the Nation State’, *Transnational Organized Crime* (Vol.2, No. 1, Spring 1996), pp. 21-48. Juga

Madesn, Frank *Transnational Organized Crime* (Abingdon: Routledge, 2009).

Makarenko, Tamara “ The Crime-Terror Continuum: Tracing the Interplay between Transnational Organised Crime and Terrorism’, *Global Crime* (Vol. 6, No. 1, Spring 2004), pp. 129-45. Juga Lihat

Mathews, Tuchman Jessica, “Redefining Security,” *Foreign Affairs* 68, no. 2 (1989) .

Moran, N. R., The Globalization of Russian, Colombian, and Chinese Organized Crime 2001: A Time Series analysis. Dissertation Abstracts, 63 (7), 2703 A, 2003.

Raymond, G. Janice, dan Donna M. Hughes, *Sex Trafficking of Women in the United States: International and Domestic Trends* (New York: Coalition Against Trafficking in Women, 2001).

Tickner, J. Ann, *Gendering World Politics* (New York: Columbia University Press 2001).

Tyldum G. dan A. Brunovskis, Describing the unobserved: Methodological challenges in empirical studies on human trafficking. In *Data and Research on Human Trafficking: A Global Survey*, ed. Frank Laczko and Elzbieta Gozdzia, IOM, Geneva, 2005.

Ullman, H. Richard, "Redefining Security," *International Security* 8, no. 1 (1983).

Williams, Paul. 'Transnational Criminal Organisations and International Security', *Survival* (Vol. 36, No. 1, Spring 1994).

Wolfers, Arnold, "'National Security'" As an Ambiguous Symbol," *Political Science Quarterly* 67, no. 4 (1952);